

## Parasitisme Sosial dan Budaya (Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan Etnis Batak dan Melayu di Deli Serdang)

Nuriza Dora<sup>1\*</sup>, Yemmi Sofia Ginting<sup>2</sup>, Wafiq Nurhalizah<sup>3</sup>, Khairunnisa Sitompul<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : [nurizadora@uinsu.ac.id](mailto:nurizadora@uinsu.ac.id), [yemmisofiaabr.ginting@gmail.com](mailto:yemmisofiaabr.ginting@gmail.com), [wafiqnurhalizah@gmail.com](mailto:wafiqnurhalizah@gmail.com),  
[nisasitompulkhairun@gmail.com](mailto:nisasitompulkhairun@gmail.com)

Alamat : Jl. William Iskandar Ps V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

Korespondensi penulis : [nurizadora@uinsu.ac.id](mailto:nurizadora@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *This study examines the phenomenon of social and cultural parasitism in the context of ethnic relations between the Batak and Malay communities in Deli Serdang Regency, North Sumatra, Indonesia. Social and cultural parasitism is reflected in patterns of dominance, wherein one ethnic group gains disproportionate access to economic, social, and symbolic resources, often at the expense of the other. The objective of this research is to analyze how such forms of dominance emerge, persist, and contribute to structural inequality and potential interethnic tensions. Adopting a qualitative approach and employing a case study method, the research investigates various dimensions of dependency within everyday social interactions. The analysis is grounded in Social Conflict Theory and Social Capital Theory to uncover underlying mechanisms that perpetuate inequality and group stratification. Findings reveal that the Batak community's economic and symbolic dominance reinforces the marginalization of the Malay community, a condition further intensified by historical legacies and local policy dynamics. The study proposes strategic recommendations for inclusive policy-making, interethnic social capital development, and culturally sensitive adaptation efforts aimed at fostering social harmony and equitable integration within a multicultural society.*

**Keywords:** *Batak, Cultural Parasitism, Ethnic Relations, Malay, Social Parasitism.*

**Abstrak :** Penelitian ini mengkaji fenomena parasitisme sosial dan budaya dalam dinamika hubungan etnis antara suku Batak dan Melayu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Parasitisme ini muncul dalam bentuk dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, maupun simbolik budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik-praktik dominasi tersebut terbentuk, dipertahankan, serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan potensi konflik antar kelompok etnis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi pola-pola ketergantungan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis dilakukan melalui lensa teori konflik sosial dan teori modal sosial untuk memahami struktur relasi kuasa yang memengaruhi ketidaksetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi ekonomi oleh komunitas Batak dan dominasi simbolik budaya mereka memperkuat ketimpangan sosial yang dirasakan oleh komunitas Melayu. Ketimpangan ini diperparah oleh konteks historis dan kebijakan lokal yang tidak selalu berpihak pada keadilan sosial. Penelitian ini memberikan rekomendasi tentang perlunya kebijakan inklusif, penguatan modal sosial lintas etnis, serta strategi adaptasi budaya untuk mendorong integrasi dan harmoni sosial di masyarakat multikultural.

**Kata Kunci :** Parasitisme Sosial, Parasitisme Budaya, Hubungan Etnis, Batak, Melayu.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan beragam suku bangsa, di mana pertemuan antar budaya menjadi bagian dari kehidupan sosial yang terus berkembang. Deli Serdang, sebagai salah satu daerah dengan masyarakat yang beragam, menjadi tempat terjadinya hubungan antara suku Batak dan Melayu yang sudah berlangsung sejak lama. Dalam hubungan ini, muncul berbagai gejala sosial yang menunjukkan adanya ketimpangan, salah satunya adalah parasitisme sosial dan budaya. Fenomena ini menggambarkan situasi

di mana satu kelompok lebih dominan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, sosial, atau budaya, sementara kelompok lainnya berada dalam posisi yang lebih lemah atau tergantung.

Parasitisme sosial dan budaya dalam hubungan antara suku Batak dan Melayu bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, misalnya, suku Batak lebih banyak terlibat dalam perdagangan dan usaha mandiri, sedangkan suku Melayu lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan sosial, di mana kelompok yang lebih kuat secara ekonomi memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, sementara kelompok lainnya menjadi lebih tergantung. Ketimpangan ini bisa memicu ketegangan sosial, terutama dalam hal perebutan peluang dan sumber daya ekonomi.

Selain di bidang ekonomi, parasitisme sosial juga terlihat dalam budaya. Dalam interaksi antara kedua suku, terlihat bahwa budaya Batak lebih menonjol dan lebih dikenal dibandingkan budaya Melayu. Dalam berbagai acara adat, pertunjukan seni, hingga pemberitaan di media, budaya Batak lebih sering ditampilkan, sementara budaya Melayu kurang mendapat perhatian. Dominasi budaya ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pengakuan identitas, dan bisa menggeser keberadaan budaya Melayu yang lebih halus dan jarang terekspos, sehingga menguntungkan kelompok yang lebih dominan secara simbolik.

Ketimpangan ini tidak hanya muncul karena interaksi sosial yang berkembang secara alami, tetapi juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik. Deli Serdang sebagai daerah yang dihuni berbagai suku telah mengalami banyak perubahan sosial sepanjang sejarahnya, termasuk migrasi, konflik, dan proses penyatuan. Dalam masa kolonial dan perkembangan politik lokal, ada kebijakan-kebijakan yang membuat struktur sosial lebih menguntungkan kelompok tertentu. Politik identitas yang berkembang di tingkat lokal juga memperkuat perbedaan sosial yang ada, sehingga ketergantungan sosial dan budaya menjadi semakin nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologi, fenomena parasitisme sosial dan budaya ini bisa dijelaskan melalui beberapa teori utama. Misalnya, Teori Konflik Sosial (Marx, 1848; Dahrendorf, 1959) menjelaskan bahwa ketegangan sosial muncul karena adanya ketimpangan kepentingan ekonomi dan dominasi kelompok tertentu dalam struktur sosial. Selain itu, Teori Modal Sosial (Putnam, 2000) menjelaskan bagaimana jaringan sosial dan akses terhadap sumber daya membentuk hubungan antar suku, di mana kelompok yang

memiliki jaringan sosial lebih kuat cenderung lebih mudah mendominasi dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks masyarakat yang beragam, memahami fenomena parasitisme sosial dan budaya sangat penting untuk menciptakan hubungan sosial yang lebih adil dan harmonis. Ketimpangan dalam hubungan antar suku tidak hanya bisa menimbulkan ketegangan, tetapi juga memperparah ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana parasitisme sosial dan budaya terbentuk dalam hubungan antara suku Batak dan Melayu, serta bagaimana proses adaptasi sosial bisa membantu mengurangi ketegangan yang muncul.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika hubungan sosial dan budaya antara etnis Batak dan Melayu di wilayah Seli Serdang, Medan. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami interaksi sosial yang sarat makna budaya dan historis. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap informan dari kedua etnis yang memiliki pengalaman langsung dalam kehidupan sosial dan budaya di daerah tersebut. Observasi partisipatif digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana interaksi antara kedua kelompok berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen sejarah, aturan sosial, serta literatur yang relevan untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi, lalu mengelompokkannya ke dalam tema-tema tertentu yang sesuai dengan teori yang digunakan. Beberapa teori yang menjadi acuan dalam analisis ini antara lain teori interaksi sosial, teori konflik, dan teori adaptasi sosial. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana parasitisme sosial dan budaya memengaruhi hubungan antar-etnis, serta bagaimana strategi adaptasi sosial dapat membentuk pola interaksi dalam masyarakat yang multicultural.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hubungan sosial antara komunitas etnis Batak dan Melayu dalam konteks kehidupan masyarakat di Deli Serdang. Relasi antara kedua kelompok ini tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya di wilayah tersebut. Hubungan ini dibentuk oleh sejarah panjang interaksi, persepsi identitas, dominasi simbolik budaya, stereotip sosial, serta kekhawatiran terhadap pelestarian warisan budaya. Meskipun secara kasat mata kedua etnis ini telah lama hidup berdampingan secara damai, penelitian ini mengungkap adanya lapisan-lapisan sosial dan kultural yang membentuk relasi mereka secara tidak seimbang. Ketimpangan ini tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, namun lebih sering hadir dalam bentuk ketegangan laten yang memengaruhi cara pandang, pola interaksi, dan distribusi kekuasaan simbolik di antara keduanya.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah perbedaan persepsi terhadap status keaslian sebagai penduduk asli kawasan Medan dan sekitarnya. Komunitas Melayu secara konsisten menegaskan identitas mereka sebagai kelompok yang lebih dahulu mendiami wilayah tersebut, dengan merujuk pada eksistensi Kesultanan Deli dan berbagai peninggalan sejarah seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, serta sistem adat dan bahasa Melayu lokal. Bagi mereka, simbol-simbol tersebut bukan sekadar artefak masa lalu, melainkan representasi dari kedaulatan budaya dan akar historis yang sah. Klaim ini memperkuat posisi mereka dalam narasi sejarah lokal dan menjadi dasar untuk menuntut pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak kultural mereka. Dalam konteks ini, identitas Melayu tidak hanya bersifat etnis, tetapi juga politis dan simbolik, karena menyangkut legitimasi atas ruang, sejarah, dan warisan budaya yang mereka anggap mulai tergerus oleh dinamika sosial kontemporer.

Sebaliknya, komunitas Batak juga menunjukkan keyakinan kuat terhadap keberadaan historis mereka di wilayah Deli Serdang. Beberapa informan dari komunitas ini menyampaikan bahwa mereka telah lama menetap di kawasan tersebut, bahkan sebelum pembentukan struktur administratif modern. Mereka menekankan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan birokrasi sebagai bukti bahwa mereka bukan sekadar pendatang, melainkan bagian integral dari pembangunan wilayah. Dalam pandangan ini, identitas Batak tidak hanya hadir secara demografis, tetapi juga merepresentasikan kekuatan struktural dan budaya yang semakin besar. Keberhasilan

individu Batak dalam menempati posisi strategis di berbagai sektor dianggap sebagai bentuk legitimasi sosial yang sah, sekaligus menjadi dasar untuk menuntut pengakuan atas peran mereka dalam membentuk wajah Deli Serdang masa kini. Hal ini menciptakan dinamika tarik-menarik antara klaim historis Melayu dan klaim kontribusional Batak, yang keduanya sah dalam konteks masing-masing, namun sering kali berujung pada ketegangan simbolik dalam ruang publik. Penelitian ini juga menyoroti ketidakseimbangan representasi budaya dalam ruang publik sebagai salah satu sumber ketegangan antar komunitas. Informan dari komunitas Melayu menilai bahwa simbol dan ekspresi budaya Batak lebih sering tampil dalam berbagai acara resmi, kegiatan seni, maupun pemberitaan media massa. Hal ini menciptakan persepsi bahwa budaya Batak lebih dominan dan lebih dihargai oleh institusi formal, sementara budaya Melayu terasa kurang terekspos, bahkan dalam lingkup lembaga pendidikan dan pemerintahan yang seharusnya menjadi ruang netral. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan kultural, seolah identitas Melayu dipinggirkan secara perlahan dan tidak mendapat pengakuan yang setara. Dominasi simbolik Batak tersebut bukan hanya menciptakan ketimpangan visual, tetapi juga berdampak pada pengakuan sosial terhadap nilai-nilai budaya Melayu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat perasaan teralienasi di kalangan masyarakat Melayu, terutama generasi muda yang tidak lagi melihat budaya mereka sebagai sesuatu yang relevan atau dihargai dalam kehidupan publik.

Aspek lain yang turut memengaruhi dinamika hubungan antar komunitas adalah keberadaan stereotip sosial yang masih melekat kuat. Informan dari komunitas Batak sering digambarkan sebagai individu yang vokal, berani, dan ekspresif, sedangkan informan dari komunitas Melayu dianggap lebih tenang, tertutup, dan cenderung menghindari konflik. Stereotip ini, meskipun tidak selalu menimbulkan ketegangan langsung, memiliki potensi menciptakan jarak sosial yang sulit dijembatani. Dalam beberapa kasus, stereotip tersebut bahkan memengaruhi proses interaksi, persepsi antar komunitas, dan perencanaan kebijakan di tingkat lokal. Ketika stereotip menjadi dasar dalam pengambilan keputusan atau dalam membentuk opini publik, maka yang terjadi adalah penguatan batas-batas sosial yang bersifat eksklusif. Hal ini menghambat terciptanya ruang dialog yang setara dan memperkuat segregasi sosial yang tidak kasat mata, namun sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kekhawatiran terhadap pembangunan fasilitas tertentu, terutama rumah ibadah, juga menjadi salah satu isu yang diangkat oleh informan dari komunitas Melayu. Beberapa dari mereka merasa bahwa ekspansi tersebut mencerminkan meningkatnya dominasi

simbolik komunitas Batak di wilayah yang dulu mereka anggap sebagai basis budaya Melayu. Meskipun tidak semua informan mengaitkan pembangunan ini dengan konflik terbuka, ada perasaan bahwa pergeseran simbolik ini berlangsung secara sistemik dan tidak mempertimbangkan sensitivitas kultural antar komunitas. Dalam konteks ini, pembangunan fisik tidak lagi netral, melainkan menjadi simbol dari pergeseran kekuasaan dan pengaruh budaya. Ketika ruang-ruang publik dan sakral mulai didominasi oleh simbol-simbol etnis tertentu, maka yang terjadi adalah pengaburan identitas lokal yang sebelumnya dianggap sebagai milik bersama. Hal ini menuntut adanya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap dinamika sosial-budaya yang ada.

Isu terakhir yang sangat penting dalam penelitian ini adalah menurunnya pelestarian budaya Melayu, khususnya di kalangan generasi muda. Informan menyayangkan kurangnya ketertarikan anak muda terhadap seni tari tradisional, musik daerah, bahasa Melayu lokal, serta praktik adat. Mereka menilai bahwa minimnya perhatian dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat degradasi budaya ini. Selain itu, kegiatan pelestarian yang ada cenderung bersifat seremoni dan tidak menyentuh aspek substansial dari regenerasi budaya. Ruang representasi yang sempit dan kurangnya dukungan terhadap komunitas seni lokal memperkuat keprihatinan terhadap masa depan budaya Melayu. Dalam konteks ini, pelestarian budaya tidak bisa hanya mengandalkan nostalgia atau romantisme masa lalu, tetapi harus dibangun melalui strategi yang terstruktur, konsisten, dan berbasis komunitas. Diperlukan pendekatan yang melibatkan generasi muda secara aktif, baik melalui pendidikan, teknologi, maupun ruang kreatif yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan identitas budaya secara relevan dengan zaman. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara etnis Batak dan Melayu di Deli Serdang tidak dapat dipahami hanya dari permukaan interaksi sosial yang tampak harmonis. Di balik keharmonisan tersebut, terdapat ketimpangan dalam pengaruh sosial, akses terhadap simbol budaya, serta persepsi terhadap identitas dan asal-usul. Meskipun konflik terbuka jarang terjadi, dinamika dominasi dan subordinasi ini memunculkan potensi ketegangan sosial yang bersifat laten. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk membangun kebijakan interetnis yang inklusif, adil, dan berpihak pada penguatan budaya lokal. Hanya dengan cara inilah harmoni sosial yang sejati dapat dibangun—bukan melalui penyeragaman, tetapi melalui pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman yang ada.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara etnis Batak dan Melayu di Deli Serdang tidak berlangsung secara setara, melainkan ditandai oleh dinamika dominasi dan ketergantungan yang kompleks. Dalam konteks sosiologi, temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Konflik Sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx (1848) dan dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf (1959), yang menegaskan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya menciptakan relasi dominasi antara kelompok yang lebih kuat dengan kelompok yang lebih lemah. Dalam hal ini, etnis Batak tampil sebagai kelompok dominan, baik dalam aspek ekonomi maupun budaya, sementara etnis Melayu mengalami marginalisasi dalam struktur sosial dan representasi public.

Dominasi simbolik yang ditunjukkan oleh budaya Batak dalam berbagai ruang publik seperti media, acara adat, dan simbol kota menggambarkan bentuk parasitisme budaya. Budaya Batak menjadi representasi yang lebih menonjol dalam lanskap sosial Deli Serdang, sedangkan budaya Melayu cenderung kurang terekspos. Ketidakseimbangan ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap identitas lokal, tetapi juga menggeser posisi budaya Melayu dalam narasi kebudayaan daerah. Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1970), fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam capital budaya dan capital simbolik, di mana kelompok dominan mampu menampilkan identitas mereka sebagai norma budaya umum, sementara budaya kelompok lain tersubordinasi.

Dalam aspek sosial-ekonomi, keterlibatan masyarakat Batak dalam sektor informal dan usaha mandiri memberi mereka peluang yang lebih besar dalam menguasai sumber daya ekonomi, sedangkan masyarakat Melayu yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan berada dalam posisi ekonomi yang lebih rentan. Pola ini menunjukkan adanya parasitisme sosial, di mana kelompok dengan jaringan sosial dan ekonomi yang kuat memiliki akses lebih luas terhadap peluang, memperkuat posisi tawar mereka dalam tatanan sosial masyarakat multietnis. Hal ini relevan dengan Teori Modal Sosial dari Robert Putnam (2000) yang menyatakan bahwa kelompok yang memiliki jejaring sosial dan institusional yang kuat akan lebih mampu mempertahankan dominasi dalam struktur sosial.

Munculnya stereotip antaretnis juga menjadi indikasi bahwa relasi antar kelompok tidak sepenuhnya harmonis. Meskipun tidak terjadi konflik terbuka, persepsi terhadap etnis Batak sebagai keras dan etnis Melayu sebagai pendiam menunjukkan adanya tension laten atau ketegangan terselubung yang dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Stereotip ini memperkuat jarak sosial dan menghambat proses

integrasi budaya. Ketimpangan representasi dalam ruang publik ikut memperkuat persepsi dominasi, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa ketidakadilan dan keterasingan dalam komunitas Melayu.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan representasi budaya. Revitalisasi budaya Melayu melalui program pelestarian berbasis komunitas, festival budaya lintas etnis, dan penguatan narasi sejarah lokal dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dialog antar etnis dan forum interkomunal juga perlu difasilitasi agar terjadi pertukaran pemahaman dan penguatan kohesi sosial di tengah masyarakat Deli Serdang yang multikultural.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Dari penelitian mengenai parasitisme sosial dan budaya dalam hubungan antara suku Batak dan Melayu di Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial dan budaya antara kedua suku ini telah menciptakan dinamika yang kompleks. Suku Batak yang lebih dominan dalam aspek ekonomi dan budaya telah memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif, sementara suku Melayu berada dalam posisi yang lebih lemah dan tergantung. Ketimpangan ini tidak hanya disebabkan oleh interaksi sosial yang alami, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sejarah dan politik yang memperkuat perbedaan sosial. Teori-teori sosiologi, seperti Teori Konflik Sosial dan Teori Modal Sosial, memberikan kerangka untuk memahami fenomena ini. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan ini agar hubungan antar suku dapat menjadi lebih adil dan harmonis.

##### **Saran**

Peningkatan Kesadaran Budaya di mana Diperlukan program-program yang meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap budaya Melayu, termasuk penyelenggaraan acara budaya dan pendidikan yang menyoroti nilai-nilai dan tradisi suku Melayu. Selanjutnya Kebijakan ekonomi yang lebih inklusif harus dirancang untuk memberikan akses yang lebih baik kepada suku Melayu terhadap sumber daya ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha kecil. Mendorong dialog dan kerjasama antar kedua suku untuk membangun saling pengertian dan mengurangi ketegangan. Forum-forum diskusi dapat diadakan untuk membahas isu-isu yang dihadapi



oleh kedua kelompok. Kebijakan Pemerintah yang Adil. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang ada dan berusaha menciptakan struktur sosial yang lebih adil, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi kedua suku. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika hubungan antar suku secara lebih mendalam, serta untuk menyalakan efektivitas strategi yang diterapkan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan budaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hubungan antara suku Batak dan Melayu dapat diperbaiki, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

## **UCAPAN DAN TERIMAKASIH**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini dengan baik dan lancar. Tanpa pertolonganNya, tentu karya ini tidak akan mungkin terwujud. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nuriza Dora, M.Hum., selaku dosen pengampu mata kuliah Relasi Antar Etnis sekaligus pembimbing utama dalam penyusunan artikel ini. Bimbingan, arahan, dan motivasi yang beliau berikan dengan penuh kesabaran dan dedikasi sangat membantu kami dalam setiap tahap penulisan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman selama proses pengumpulan data. Terima kasih khusus kami tujukan kepada Bapak Manaf sebagai informan kunci, serta Bapak Sukri sebagai informan pendukung, juga kepada Ibu Fela Simatuang, Bapak Dodi Sinaga, Bapak Ramadhan Ritonga, Ibu Tiara, Ibu Marlina, Ibu Irma, Ibu Putri, dan informan lainnya yang telah memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya isi dan analisis artikel ini

Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dan rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat, dukungan moral, serta kebersamaan yang sangat berarti selama proses penyusunan artikel ini berlangsung. Dukungan kalian menjadi energi positif yang terus menguatkan kami. Tak lupa, rasa terima kasih yang tulus kami haturkan kepada orang tua kami masing-masing atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Pengorbanan dan cinta mereka menjadi fondasi utama dalam setiap langkah yang kami tempuh.

Akhir kata, kami menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan kami semoga tulisan ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam memahami dinamika relasi antar-etnis, khususnya dalam konteks parasitisme budaya. Semoga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber dominasi atau ketimpangan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, menghargai, dan membangun kebersamaan dalam keberagaman. Karena

sejatinya, budaya bukan untuk saling menindas, tetapi untuk saling mengenal dan menyatu dalam harmoni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (2014). *Pengantar sistem sosial budaya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Barthes, R. (2007). *Membedah mitos-mitos budaya massa* (S. Sihombing, Trans.). Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, P. (1999). *Outline of a theory of practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena produksi kultural: Sebuah kajian sosiologi budaya* (Y. S. Setyawan, Trans.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Featherstone, M. (2001). *Postmodernisme dan budaya konsumen* (S. M. Arifin, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbullah, J. (2006). *Social capital: Menuju keunggulan budaya manusia Indonesia*. Jakarta: MRUnited Press.
- Ihromi, T. O. (2016). *Pokok-pokok antropologi budaya*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1969). *Pengantar antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto Partai Komunis*. London: Communist League.
- Parekh, B. (2008). *Rethinking multiculturalism: Keberagaman budaya dan teori politik* (A. Gunawan, Trans.). Yogyakarta: Kanisius.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Salim, A. (2002). *Perubahan sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Strauss, L. (2005). *Antropologi struktural* (S. Mulyana, Trans.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, M., & Putranto, H. (Eds.). (2005). *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.